

Judul : Efektivitas Dana Otsus Papua Perlu Ditingkatkan
Tanggal : Rabu, 05 Februari 2020
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 3

Efektivitas Dana Otsus Papua Perlu Ditingkatkan

ANGGOTA Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Hendrawan Supratikno berharap efektivitas dana otonomi khusus (otsus) untuk Provinsi Papua dan Papua Barat ditingkatkan. DPR pada prinsipnya agar pemerintah melakukan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua.

"Kita ingin efektivitas dana otsus ditingkatkan agar bermanfaat bagi masyarakat Papua," katanya di Gedung

Parlemen, Jakarta, kemarin. Hendrawan menyebutkan, berdasarkan UU No 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua, alokasi dana otsus bagi provinsi tersebut berakhir pada 2022. Pemerintah dan DPR berencana mendiskusikan keberlangsungan dana itu dalam waktu dekat. "Saat ini Prolegnas 2020 sudah memasukkan revisi UU Otsus ini," ujarnya.

Hendrawan belum bisa memberi jawaban tegas apakah dana otsus ini bakal

diteruskan atau tidak. "Kita lihat saja pembahasannya nanti," pungkasnya.

Sebelumnya, Hendrawan berharap dana otsus Papua bisa ditingkatkan untuk pendidikan.

"Karena bagaimanapun, apa pun sistem yang kita bangun, apa pun rencana kerja yang kita buat, kalau *human investment* atau SDM-nya tidak memiliki kapabilitas yang tinggi, kompetensi yang tinggi, nanti akan kesulitan," ujar politikus Fraksi PDIP ini.

Hingga tahun ini, Pemerintahan Jokowi tetap berkomitmen membangun wilayah Papua. Dalam Rencana Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN) 2020, pemerintah mengalokasikan dana otsus Papua sebesar Rp8,37 triliun. Provinsi Papua mendapat dana sebesar Rp5,861 triliun dan Provinsi Papua Barat senilai Rp2,512 triliun. Selain itu, masih ada pula dana tambahan infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Papua (Provinsi Papua dan Papua Ba-

rat) sebesar Rp4,680 triliun. Sementara itu, pengamat politik LIPI Adriana Elisabeth berharap pemerintah menggunakan pendekatan kesejahteraan maupun pembangunan dalam menyelesaikan konflik Papua. Namun, prosesnya harus melibatkan masyarakat setempat dengan mengetahui terlebih dahulu kebutuhan mereka.

"Jangan sampai pembangunan yang dilakukan justru menimbulkan persoalan baru," ujarnya. (Che/P-5)